

Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Efektivitas Pengendalian Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

(The Effect Of Participation Based Budgeting Effectiveness Against Government Control In Banyuwangi)

Ahmad Iwan Sulistyio

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 12, Jember 68121

E-mail: ahmad.iwan.sulsityo@gmail.com

Abstrak

Penganggaran merupakan masalah yang penting dalam kelangsungan organisasi sektor publik, karena anggaran mempunyai fungsi memberikan gambaran mengenai apa saja target kinerja yang ingin dicapai selama satu tahun keinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penganggaran berbasis partisipatif terhadap efektivitas pengendalian keuangan dan pengendalian kinerja, sehingga nantinya dapat diketahui kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuwangi apakah sudah sesuai dengan targetnya atau tidak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, pengukuran dilakukan dengan melakukan beberapa uji terhadap 3 variabelnya yaitu Penganggaran Berbasis Partisipatif, Efektivitas Pengendalian Keuangan dan Efektivitas Pengendalian Kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penganggaran Berbasis Partisipatif berpengaruh terhadap Efektivitas Pengendalian Keuangan dan Efektivitas Pengendalian Kinerja yang ditunjukkan dengan hasil signifikan dari hasil pengolahan data.

Kata Kunci: *Penganggaran, Penganggaran Berbasis Partisipatif, Efektivitas Pengendalian Keuangan, Efektivitas Pengendalian Kinerja*

Abstract

Budgeting is an important issue in the continuity of public sector organizations, because the budget has the function gives an overview of what the performance target to be achieved during the year. This study aims to determine the effect of participation-based budgeting on the effectiveness of financial control and performance control, so it will find the performance of the SKPD in Banyuwangi is already in line with the goal or not. Data used in this study are primary data. This research is a quantitative research, the measurement is done by doing some tests on three variables, namely Participation Based on Budgeting, the Financial Control Effectiveness and Performance Control Effectiveness. The research results indicate that the effect on the Participation-Based Budgeting with Financial Control Effectiveness and Performance Control Effectiveness as indicated by the significant results of the data processing.

Keyword: *Budgeting, Participation Based Budgeting, Financial Control Effectiveness, Performance Control Effectiveness*

Pendahuluan

Salah satu masalah dalam pengelolaan keuangan instansi sektor publik adalah masalah anggaran. Menurut Mardiasmo (2009:61), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pada dasarnya peran anggaran dalam sektor publik tidak berbeda dengan peranan anggaran dalam organisasi yang berorientasi pada laba, dimana anggaran digunakan untuk perencanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Oleh karena anggaran memiliki peranan yang penting, maka suatu unit organisasi sektor publik hendaknya mencatat dan melaporkan anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga nantinya hasil yang diperoleh akan dapat dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya agar dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan penyusunan anggaran tahun sebelumnya.

Diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, membawa perubahan yang sangat berarti dalam hubungan tata pemerintah dan hubungan keuangan, sekaligus membawa peranan yang penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006). Namun sejak tahun 2010 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up*.

Dalam pendekatan partisipatif peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa: a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD; b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; c) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media; g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif; h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program.

Wujud nyata pengendalian keuangan dalam anggaran berbasis partisipatif adalah penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB). Analisis Standar Belanja adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Salah satu hal yang

harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 167 (3) adalah ASB. Alokasi belanja ke dalam aktivitas untuk menghasilkan output seringkali tanpa alasan dan justifikasi yang kuat. ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus menerus karena adanya pembandingan biaya per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik dalam desain aktivitas.

Menurut Rizal (2005), pengendalian kinerja bertujuan untuk menjamin bahwa kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian kinerja ini memusatkan pada produktivitas dan motivasi manajer dalam mengoperasikan program dan proyek secara efisien dan efektif. Wujud nyata pengendalian kinerja dalam anggaran berbasis kinerja adalah adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar pelayanan minimal merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya SPM akan menjamin minimal pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Dengan adanya SPM maka akan terjamin kualitas dan kuantitas minimum dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian Giusti (2013) yang melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Jember dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD di Kabupten Jember) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Senjangan Anggaran. Artinya semakin tinggi partisipasi akan semakin menaikkan Senjangan Anggaran. Partisipasi yang semula diharapkan akan mempertinggi kinerja karena dengan harapan akan memacu semangat untuk bersungguh-sungguh mencapai tujuan karena telah menetapkan standarnya sendiri ternyata justru dimanfaatkan untuk menciptakan Senjangan Anggaran agar anggaran lebih mudah dicapai sehingga diharapkan pencapaian tersebut akan mempertinggi penilaian kerjanya. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,016 atau $<0,05$ serta nilai t hitung yang lebih besar dari t table yaitu $2,504 > 2,02$. Hal ini berarti jika ada kenaikan Partisipasi Anggaran maka terjadi kenaikan Senjangan Anggaran dan sebaliknya jika Partisipasi Anggaran turun maka Senjangan Anggaran akan turun. Dari penelitian ini peneliti tertarik untuk dapat mengetahui apakah pengendalian keuangan di Instansi Pemerintah di Kabupaten Banyuwangi juga terlaksana dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya sennjangan anggaran.

Menurut Banyuwangikab.go.id (2016) Pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp 20.8 juta pada 2010 menjadi Rp 33,6 juta pada 2014. Adapun Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) naik dari Rp 32,46 triliun pada 2010 menjadi Rp 53,37 triliun pada 2014. RAPBD juga mengalami kenaikan untuk tahun 2015 lebih besar dari Rp 3 triliun atau lebih besar dari APBD 2010 yaitu sebesar

Rp 1,29 triliun. Dari data tersebut peneliti ingin mengetahui apakah memang penganggaran berbasis partisipatif yang diterapkan di instansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi terlaksana dengan baik sehingga kinerja instansi pemerintah tersebut dapat beroperasi secara maksimal yang akhirnya menyebabkan perekonomian daerahnya semakin membaik.

Penelitian ini mengambil objek penelitian di Kabupaten Banyuwangi tingkat dinas, badan, dan kantor. Pemilihan dinas, badan, dan kantor dilakukan dengan alasan instansi tersebut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang menyusun, menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*Primary data*), menurut Indriantoro dan Supomo (2009:146), data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan teknik kuisioner.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat yang memegang jabatan kepala dinas, kepala bagian dan kepala bidang di tingkat SKPD pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian yang dalam penelitian ini adalah proses penyebaran kuisioner dilaksanakan mulai tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan 17 Juni 2016. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* (pemilihan sampel secara tidak acak), dengan kriteria yang pertama adalah ikut serta dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja dan yang kedua adalah menduduki jabatan lebih dari satu tahun.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:181), suatu instrument dapat dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur yang seharusnya diukur. Karena dalam penelitian ini menggunakan instrumen beberapa kuisioner, maka daftar pertanyaan yang disusun dalam kuisioner tersebut harus mampu mengukur apa yang ingin diukur oleh peneliti. Uji validitas dilakukan terhadap kuisioner dengan mengkorelasi skor item dengan skor total seluruh item kuisioner. Suatu pernyataan dikatakan valid jika r_{hitung} (koefisien korelasi) lebih besar dari r_{tabel} (nilai kritis). Selain itu jika nilai *level of significance* lebih kecil dari 0,05 (5%), maka instrument dapat dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh suatu instrument

pengukuran. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran beberapa kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Penelitian ini dalam mengukur konsistensi alat ukur (kuisioner) menggunakan uji *Cronbach's Alpha* yang menunjukkan reliabilitas, konsistensi dan homogenitas antar variabel yang diteliti. Suatu instrument dapat dikatakan reliabel jika memiliki koefisien keandalan reliabilitas (*Cronbach's Alpha*) lebih besar dari 0,6 (Santoso,2014). Semakin besar nilai alpha, maka alat pengukur yang digunakan semakin reliabel.

3. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Normal *Probability Plot of Standarized Residual*, maka akan menunjukkan titik-titik penyebaran sampel dalam bentuk grafik. Data normalitas dapat dilakukan dengan melihat persebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Menurut Ghazali (2011:76), dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan yang kedua adalah jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi kesamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghazali (2011:69) model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Dasar analisis dari uji heteroskedastisitas melalui grafik plot adalah sebagai berikut: Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran atas dugaan sementara dari suatu fenomena. Karena penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen dan dua variabel dependen yang terpisah, maka pengujian hipotesisnya menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh antara suatu variabel independen

dengan variabel dependennya. Model persamaan regresi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = a + bX \text{ dan } Y_2 = a + bX$$

Dimana:

Y_1 = Efektivitas Pengendalian Keuangan

Y_2 = Efektivitas Pengendalian Kinerja

X = Penganggaran Berbasis Partisipatif

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

Uji-t

Uji-t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya, dengan formulasi sebagai berikut:

a. Menentukan Hipotesis

H_0 : $b_1 = 0$, berarti variabel independen (X) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y)

H_a : $b_1 \neq 0$, berarti variabel independen (X) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y)

b. Menentukan t hitung dengan rumus:

$$T_{hitung} = b / Sb (b)$$

Dimana:

b = koefisien regresi parsial determinasi

Sb = standar deviasi dari b

c. Menentukan kriteria pengambilan keputusan
kriteria dalam pengambilan keputusan adalah apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, atau nilai $\alpha > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sebaliknya apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, atau nilai $\alpha < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil Penelitian

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan SKPD, di Kabupaten Banyuwangi diatur dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2009 bahwa Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran atau barang.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

Uji Validitas

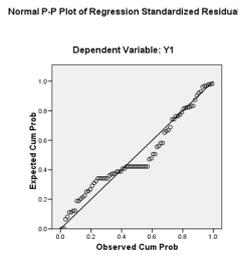
Dapat diketahui bahwa masing-masing indikator yang digunakan baik dalam variabel independen (penganggaran berbasis kinerja) maupun variabel dependen (efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja) mempunyai nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel pada $n = 80$ dan $\alpha = 5\%$ yaitu sebesar 0,217 serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam variabel penelitian ini layak atau valid digunakan sebagai pengumpul data yang berarti pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji Reliabilitas

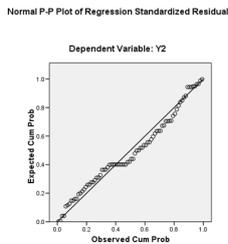
Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten. Suatu pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang jelas mudah dipahami dan memiliki interpretasi yang sama meskipun disampaikan kepada responden yang berbeda dan waktu yang berlainan. Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel, karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* (α) lebih besar dari 0,60 yang berarti bahwa pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Sesuai yang disyaratkan oleh Santoso (2014) bahwa suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Normal Probability Plot of Standarized Residual*.



Uji Pengaruh X terhadap Y1

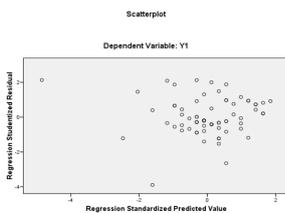


Uji Pengaruh X terhadap Y2

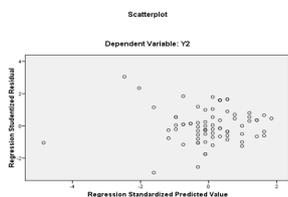
Dari grafik hasil uji normalitas terhadap model regresi yang dapat dilihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Prosedur dilakukan adalah mendeteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *scatter plot* pada lampiran 6, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*.



Uji Pengaruh X terhadap Y1



Uji Pengaruh X terhadap Y2

Hasil analisis dari grafik *scatterplots* pada gambar terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Pengujian regresi linear sederhana berguna untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independen (penganggaran berbasis partisipatif) terhadap variabel dependen (efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja) dan dilakukan dengan bantuan program *SPSS for Windows*.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y_1 = 12,368 + 0,707 X$$

Interpretasi atas hasil analisis tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 12,368, artinya nilai konstanta ini menunjukkan besarnya nilai variabel efektivitas pengendalian keuangan pada saat variabel penganggaran berbasis partisipatif sama dengan nol.

b = 0,707, artinya apabila variabel penganggaran berbasis partisipatif mengalami peningkatan maka akan diikuti peningkatan efektivitas pengendalian keuangan.

$$Y_2 = 9,171 + 0,796 X$$

Interpretasi atas hasil analisis tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 9,171, artinya nilai konstanta ini menunjukkan besarnya nilai variabel efektivitas pengendalian kinerja pada saat variabel penganggaran berbasis partisipatif sama dengan nol.

b = 0,796, artinya apabila variabel penganggaran berbasis partisipatif mengalami peningkatan maka akan diikuti peningkatan efektivitas pengendalian kinerja.

Pembahasan

Uji t

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Caranya adalah dengan membandingkan nilai statistik t_{hitung} dengan nilai statistik t_{tabel} dengan tingkat signifikan (α) yang digunakan yaitu 5%. Variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, atau nilai probabilitas $< 5\%$ (α).

Hasil perhitungan uji t dengan menggunakan program *SPSS for Windows* dapat dilihat pada Tabel 4.5. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

Pengaruh variabel penganggaran berbasis partisipatif (X) terhadap efektivitas pengendalian keuangan (Y)

Hasil pengujian untuk pengaruh variabel penganggaran berbasis partisipatif (X) terhadap efektivitas pengendalian keuangan (Y) diperoleh t_{hitung} sebesar 8,711 yang lebih besar daripada t_{tabel} sebesar 1,990 dan signifikansi $< \alpha$ yaitu $0,000 < 0,05$. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat

probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka H_0 ditolak, berarti secara parsial variabel penganggaran berbasis partisipatif (X) mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuwangi (Y). Sehingga, hipotesis yang menyatakan penganggaran berbasis partisipatif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian keuangan terbukti kebenarannya (H_1 diterima).

Pengaruh variabel penganggaran berbasis partisipatif (X) terhadap efektivitas pengendalian kinerja (Y)

Hasil pengujian untuk pengaruh variabel penganggaran berbasis partisipatif (X) terhadap efektivitas pengendalian kinerja (Y) diperoleh t_{hitung} sebesar 8,116 yang lebih besar daripada t_{tabel} sebesar 1,990 dan signifikansi $< \alpha$ yaitu 0,000 $< 0,05$. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka H_0 ditolak, berarti secara parsial variabel penganggaran berbasis partisipatif (X) mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuwangi (Y). Sehingga, hipotesis yang menyatakan penganggaran berbasis partisipatif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian kinerja terbukti kebenarannya (H_2 diterima).

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penganggaran berbasis partisipatif terhadap efektivitas pengendalian keuangan dan kinerja pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

Penganggaran berbasis partisipatif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan dengan koefisien 0,707. Hal ini berarti dengan semakin baiknya penganggaran berbasis partisipatif maka efektivitas pengendalian keuangan juga meningkat. Hal ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Giusti (2013). Penganggaran berbasis partisipatif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian kinerja dengan koefisien 0,796. Hal ini berarti dengan semakin baiknya penganggaran berbasis partisipatif maka efektivitas pengendalian kinerja juga meningkat. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sardjito dan Muthaher (2007) yang menyatakan ada pengaruh antara penganggaran berbasis partisipatif dengan efektivitas pengendalian kinerja.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut yaitu dalam melakukan penelitian, peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung terhadap responden karena metode yang diterapkan adalah metode

kuesioner. Sehingga peneliti tidak dapat mengetahui secara langsung situasi dan kondisi responden saat mengisi kuesioner, serta tidak terlibat secara langsung dengan aktivitas yang ada dalam instansi tersebut. Hal ini menyebabkan peneliti tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi sebenarnya mengenai penganggaran berbasis partisipatif, efektivitas pengendalian keuangan, dan efektivitas pengendalian kinerja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuwangi dan penelitian ini hanya diwakili oleh satu variabel bebas yaitu penganggaran berbasis partisipatif, padahal ada faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja.

Saran dalam penelitian ini adalah Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil kuisisioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden. Hal ini bisa menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan kondisi sesungguhnya. Sehingga, diharapkan untuk penelitian yang selanjutnya menggunakan metode pengamatan secara langsung atau observasi. Serta Sebagai acuan penelitian yang akan datang dengan tema sejenis diharapkan untuk dapat menambahkan variabel yang digunakan seperti pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan lainnya sehingga hasil temuannya lebih baik dalam menjelaskan mengenai efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Daftar Pustaka

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giusti, Guido. 2013. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD-SKPD Kabupaten Jember)*. Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Indriantoro dan Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Rizal, Saefudin. 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (revisi). [Http://www.bpkp.go.id/unit/sakd/abkrevisi.pdf](http://www.bpkp.go.id/unit/sakd/abkrevisi.pdf). [26 September 2009].
- Santoso, Singgih. 2014. *Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Sadjito, Bambang dan Muthaher, Osmad. 2007. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X.
- [Http://www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)